

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

(RPS)

MATAKULIAH : HUKUM SUMBER DAYA ALAM

SEMESTER GANJIL 2017/2018



DOSEN PENGAMPU:

- 1. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**
- 2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.**
- 3. Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H.**
- 4. Dr. Sudirman Saad, S.H., M.Hum.**
- 5. Dr. Sri Susyanti, S.H., M.H.**
- 6. Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum.**
- 7. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**
- 8. H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H.**
- 9. Fitri Pratiwi Rasyid Thaha, S.H., M.H.**



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM SUMBER DAYA ALAM	329B132 3	3	WF	HPDT	VI
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & P		
	Tanda Tangan		Tanda Tangan		
	Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.		Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

s1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum
p2	Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum
P4	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kemampuan memahami pengertian berbagai perspektif terhadap sumber daya alam, menemukan dan menganalisis permasalahan hukum terkait SDA, memahami dan memberikan alternatif pemecahan masalah hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, memahami berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan SDA, menganalisis dan mengkomunikasikan berbagai aspek yang terkait dengan SDA, ketrampilan untuk merumuskan norma hukum terkait dengan pengaturan dan pengelolaan SDA; memiliki integritas dan kesadaran hukum untuk menegakkan kelestarian SDA, memiliki integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum SDA, memiliki kemampuan memebandingkan berbagai aturan pengelolaan jenis-jenis SDA baik yang dapat diperbaharui (renewable resources) maupun yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources), dan kemampuan mengakses informasi tentang pengaturan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi informasi yang tersedia.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, harmonisasi pengaturan SDA dan peraturan perundang-undangan (sinkronisasi horizontal), asas-asas hukum dan tujuan pengelolaan SDA, Penggolongan SDA, penatagunaan dan pelestarian SDA, hak penguasaan negara (HPN) dan tujuan HPN atas SDA, sinkronisasi vertikal peraturan perundang-undangan terkait SDA (pusat-daerah), pengaturan pengelolaan SDA yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan SDA yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources), hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah.

- Buku Acuan:**
1. A. Saryono, 2002. Pengelolaan Hutan, Tanah, dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an. Pustaka Al Husna, Jakarta.
 2. Abrar Saleng, 2004. Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta
 3. A. Mappadjantji Amien, 2005, Kemandirian Lokal, Gramedia. Jakarta.
 4. Boedi Wijardjo et all, Manajemen Sumberdaya Alam, BSP, Kumala. Jakarta.
 5. Benda-Beckmann, 1992. Law as a Resource in Agrarian Struggles. Agricultural University, Wageningen, Netherlands.
 6. Boedi Harsono, 1999. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan. Jakarta.
 7. Andi Mappadjantji Amien dan Abrar Saleng, 2001. Pengaturan Pengelolaan Pertambangan dalam Era Otonomi Daerah dari Perspektif Kemandirian Lokal. Prosiding Seminar Nasional, kerjasama UNHAS-Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DP-ESDM), Pustaka Ramadhan, Bandung.
 8. Barrow, C.J. 1996, Environmental and Social Impact Assessment, An Introduction, Arnold, London.

- 9 Canten, L.W., Environmental Impact Assessment. Mc Graw-Hill, New York.
- 10 Abdullah Marlang, 1997. Penegakan Hukum di Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan, Disertasi PPS Unhas, Ujung Pandang.
- 11 Benda-Beckmann, et all (ed) 2001 Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- 12 Bruce Mitchel et all. (ed) 2001 Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- 13 Kementerian Lingkungan Hidup, 2000. Konferensi Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam, Jakarta.
- 14 Indonesia Mining Association (IMA), 2002. Indonesia Mining into the New Millenium. Jakarta.

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN/SASARAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN/MATERI PEMBELAJARAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	KRITERIA PENILAIAN (INDIKATOR)	BOBOT NILAI (%)
1.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrak Perkuliahan Mahasiswa mampu mengaitkan Hukum Agraria dengan HSDA 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrak Perkuliahan Kaitan antara Hukum Agraria dengan Hukum SDA Ruang lingkup HSDA 	Kuliah Interaktif		1. Kemampuan mengaitkan antara Hukum Agraria dengan HSDA	
2.	<ul style="list-style-type: none"> Mampu memahami makna dan tujuan Hak Penguasaan Negara atas SDA 	Makna dan Tujuan Hak Penguasaan Negara (HPN) atas SDA	Kuliah		1. Kualitas pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. 2. Kuis dan respons atas materi kuliah.	%
3.	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu membedakan definisi Hukum SDA dari berbagai perspektif Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari berbagai teori tentang Hukum SDA. 	Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif	Kuliah Interaktif	1.	2. Keaktifan 3. Kemampuan mengingat dan menjelaskan	3%
4.	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menguraikan asas-asas hukum dan tujuan Pengelolaan SDA 	<ul style="list-style-type: none"> asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa/rakyat, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas partisipatif, dan asas berkelanjutan serta asas berwawasan lingkungan. 	Kuliah interaktif		1. Respon mahasiswa ttg materi yg diberikan . 2. Keaktifan dalam diskusi 3. Kemampuan memahami makna asas-asas pengelolaan SDA.	8%

		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan tujuan pengaturan SDA yaitu: keberlangsungan hidup umat manusia, kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian serta keadilan 				
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menguraikan dan mengelompokkan SDA berdasarkan karakteristik, sifat, dan kewenangan pengelolaannya SD yang dapat diperbaharui (<i>renewable resources</i>) dan SDA yang tidak dapat diperbaharui (<i>unrenewable resources</i>) 	Pengaturan Pengelolaan SDA yang dapat diperbaharui (<i>renewable resources</i>) dan SDA yang tidak dapat diperbaharui (<i>unrenewable resources</i>)	Kuliah Interaktif	1.	1. Kemampuan menguraikan dan mengelompokkan SDA	5%
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menguraikan urgensi pengaturan perundang-undangan berbagai jenis SDA dengan mengidentifikasi substansinya. 	Urgensi Pengaturan Sumber daya..Alam	Kuliah Interaktif	1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keaktifan 2. Kemampuan menguraikan dan mengidentifikasi 3. Tugas mengumpulkan Peraturan 	5%
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaturan SDA keterkaitannya SDA lainnya. (sinkronisasi horizontal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaitan SD Kehutanan dengan SD Pertambangan • SD Pertambangan, Kehutanan, Perikanan, Pesisir dan Kelautan dengan Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat. 	Kuliah dan Kajian Pustaka	1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon mahasiswa tentang materi yang diberikan 2. Kemampuan menganalisis berbagai produk perundang-undangan terkait SDA. 	6%
8.	<ul style="list-style-type: none"> • MID TEST 					

9, 10, 11, 12	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu membedakan Penguasaan, dan Pemanfaatan SDA meliputi Perizinan, Perjanjian, dan Hak 	<ol style="list-style-type: none"> SD Kehutanan SD Pertambangan SD Perikanan, Pesisir dan Kelautan SD Perkebunan 		1.	2.	
13.	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu membandingkan Hukum Pengelolaan SDA antara Indonesia dengan Negara-negara lain 	Perbandingan Hukum Sumberdaya Alam Indonesia dengan Negara lain		3.	4.	
14.	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanggungjawab hukum pengelolaan dan perusahaan SDA terhadap masyarakat (tanggungjawab social) Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai jenis tanggungjawab social dan lingkungan dari pengelolaan dan perusahaan SDA. Mahasiswa mampu menjelaskan tanggungjawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>) pengelolaan SDA 	Pengaturan Hubungan Kontribusi pengelolaan dan perusahaan SDA dengan masyarakat sekitar	Kuliah Interaktif			7%
15.	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik berbagai peraturan kebijakan (<i>beleidregels</i>) pengelolaan SDA Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebijakan hokum pengelolaan dan perusahaan SDA dengan kebijakan otonomi daerah. 	Peraturan Kebijakan (<i>beleidregels</i>) Pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah	Diskusi			8%

16.		FINAL TEST	Tertulis			10%
-----	--	------------	----------	--	--	-----

Makassar, 19 Nopember 2014

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003